

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian terkait fakta-fakta yang diperoleh selama melaksanakan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pekerja ditinjau dari upah minimum Provinsi Gorontalo (studi di CV. Arca Group) penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja (security) di CV. Arca Group Provinsi Gorontalo ditinjau dari sistem pengupahannya telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2012 dan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 426/13/X/2014 Gorontalo tentang Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2015.
 - a. Bahwa pihak pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan sistem pengupahan telah mengeluarkan keputusan tentang besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo untuk tahun 2015 sebesar Rp. 1.600.000 perbulan
 - b. Yang melanggar akan diberikan sanksi pidana kurungan penjara dan denda 100 juta. Namun akan diawali dengan proses penyidikan jika benar-benar ada perusahaan yang melanggar ketentuan tentang sistem pengupahan yang berlaku di Provinsi

Gorontalo, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap pekerja (security) di CV. Arca Group Provinsi Gorontalo ditinjau dari sistem pengupahannya belum berjalan maksimal, hal ini ditunjukkan oleh dua indikator yakni kurangnya kesadaran pihak perusahaan atau majikan dan tidak adanya aduan atau laporan dari pihak buruh atau pekerja.

5.2 Saran

Memperhatikan kesimpulan yang diuraikan peneliti di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintahan Provinsi Gorontalo yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo seharusnya memperhatikan nasib buruh dan pekerja agar hak-hak mereka termasuk dalam sistem pengupahan agar dapat terpenuhi sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
2. Pemerintah Provinsi Gorontalo, Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tidak harus menunggu adanya laporan dari pihak buruh atau pekerja yang tidak dipenuhi hak-hak mereka, tapi seharusnya lebih peka dan proaktif terhadap nasib buruh dan pekerja yang ada di Provinsi Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aloysius, dkk, 2014, *Asas-asas Hukum Perburuhan*. Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.
- Djumadi, 2002, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djumialdji, 2005, *Perjanjian Kerja, Edisi Revisi*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasanuddin, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: PT. Pustaka Al-Husna Baru, Jakarta.
- Lalu Husni, 2010. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rachmat Trijono, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit. Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Sukanto Reksohadiprodjo dan T.Hani Handoko, 2001, *Organisasi Perusahaan, Teori Struktur dan Perilaku*, Penerbit: BPFE-Yogyakarta, Cetakan Ketigabelas.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainal Asikin dkk, 2002, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Keputusan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia, Nomor:KEP.49/MEN/IV/2004 Tentang Ketentuan Struktur Dan Skala upah

Lampiran:

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Heriyanto Pakaya Kepala Bidang HIWAS
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo



Wawancara dengan Tenaga kerja (Security) CV. Arca group

Lampiran 2

CURRICULUM VITAE



1. Identitas :

N a m a : Yayuk S. Abdullah
 NIM : 271 411 068
 Tempat Tanggal Lahir : Luwuk, 14 Desember 1993
 Angkatan : 2011
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa
 Tengah, Kabupaten Bone Bolango,
 Provinsi Gorontalo

2. Riwayat Pendidikan

SD : SD Inpres Pembina Pagimana Tahun
 2005
 SMP : SMP Negeri 1 Pagimana Tahun 2008
 SMA : SMA negeri 1 Kabila Tahun 2011